

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai daerah lingkungan hidup yang cukup luas dan beragam, maka dari itu hak bagi seluruh manusia mendapat lingkungan yang sehat dan baik, namun lingkungan hidup di sekitar kita di setiap harinya kini semakin memburuk dan tercemar. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia.

Di indonesia, dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sudah ada UU yang mengatur, yaitu UU no 32 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Lihat, UU no 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Dan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentuk dari lempeng-lempeng gerak bumi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki permasalahan alam yang tidak sedikit, diantaranya banjir, longsor, dll. Dan salah satunya adalah banjir rob. Rob ini menyebabkan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang ketinggian tanahnya lebih rendah daripada ketinggian air laut menjadi terganggu. Rob merupakan kejadian meluapnya atau pasangunya permukaan air laut ke daratan di sekitarnya. Dengan kata lain rob dapat disebut juga dengan banjir air laut. Pasang surut air laut adalah naik atau turunnya posisi permukaan perairan atau samudera yang di sebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan atau matahari.<sup>2</sup>

Di provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang menjadi langganan hadirnya air rob, salah satunya di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Sayung, beberapa desa sudah terkena dampak rob. Beberapa desa sudah tak lagi berpenghuni karena wilayah daratannya sudah tergenang air. Terkait konstruksi sabuk pantai berupa *hard structure* , seperti *sea wall (tanggul laut)*, pemecah ombak, dan lainnya sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu. Beberapa di antaranya sudah dilaksanakan, tetapi hasilnya belum optimal.<sup>3</sup>

Sayung merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Demak yang letak geografisnya di Pantai Utara (Pantura) dan berhubungan langsung

---

<sup>2</sup>Dikutip dari kompas.com, pada 15 April 2017

<sup>3</sup>*Ibid*

dengan Laut Jawa. Wilayah pesisir ini rawan terhadap bahaya banjir khususnya banjir yang disebabkan air laut pasang. Air laut pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya tepi pantai. Gelombang pasang juga bisa diartikan sebagai gerakan yang menggelembung pada permukaan laut dan menimbulkan gempuran dahsyat di tepi pantai.<sup>4</sup> Akibat dari banjir ini menyebabkan menurunnya fungsi lahan akibat tergenangnya permukaan air laut di saat pasang naik (rob) telah menyebabkan berbagai masalah di daerah tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada survey pendahuluan daerah pesisir Demak mengalami banjir rob pada saat pasang tertinggi dan kembali pada saat pasang terendah. Banjir rob menggenangi kawasan pemukiman di beberapa Desa di pesisir Kabupaten Demak. Permasalahan banjir rob terus berlanjut sampai saat ini.<sup>6</sup>

Selain penyebab secara alamiah, aktivitas manusia juga sangat berperan dalam meluasnya banjir rob di wilayah pesisir Kabupaten Demak. Menurut Rindarjono (2010) tindakan merusak pantai berupa konversi kawasan lindung menjadi tambak dan pemukiman membuat wilayah pesisir menjadi lebih

---

<sup>4</sup>Heru P Susila, *Bencana Alam Hidrologi*, ( Jakarta : PT Pustaka Tiga Kelana, 2015), hal. 52

<sup>5</sup> Petrus Subardjo, *Studi Morfologi Guna Pemetaan rob di Pesisir Sayung Kabupaten Demak*, jurusan Ilmu Kelautan FPIK-UNDIP, tahun 2004, hal.154, dikutip dari <http://suabrdjo.wordpress.com>

<sup>6</sup> Adi Chandra Kusuma, *Identifikasi Daerah Rawan Rob Untuk Evaluasi Tata Ruang Pemukiman di Kabupaten Demak*, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univertias Diponegoro, tahun 2011, hal. 2

rawan. Selain itu, sejak adanya reklamasi pantai di Kota Semarang banjir rob dan abrasi di Kabupaten Demak semakin meluas.<sup>7</sup>

Anggota DPR RI, Fathan Subchi, mengatakan bahwa sabuk pantai amat penting bagi keberlangsungan komunitas di wilayah pesisir utara. Sabuk pantai di harapkan bisa menjadi pengaman bagi wilayah yang rentan terhadap terjangan ombak. Sabuk pantai juga bisa menjadi jalan alternatif yang menghubungkan Demak dan Jepara. “ Penanganan rob harus serius. Setiap tahun rob naik mencapai 10 cm. Dengan kondisi seperti itu, bukannya tak mungkin 20-50 tahun mendatang Demak akan tenggelam,” kata Fathan.<sup>8</sup>

Salah satu penyebab banjir rob dan abrasi semakin parah di wilayah pesisir Demak adalah akibat pembangunan yang tidak terkendali di wilayah Semarang. Dimulai sejak pembangunan pelabuhan tanjung emas disusul reklamasi pantai marina, penggunaan air tanah yang membabi buta dan pembukaan kawasan industri baru yang tidak kenal kompromi. Dampaknya mulai tahun 2005 sudah ada sekitar 758 H pantai terkikis abrasi, tiga desa di Kecamatan Sayung yaitu di Desa Bedono, Desa Senik dan Desa Tambaksari hilang, 200 KK kehilangan tempat tinggal, dan ribuan nelayan dan petani tambak di kawasan pesisir Demak beralih profesi menjadi buruh murah di pabrik-pabrik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Dikutip dari kompas.com, pada 15 April 2017

<sup>9</sup>*Ibid*

Saat ini bendungan permeable yang dibangun masyarakat Desa Timbulsloko dan Bedono menunjukkan hasilnya sangat menggembirakan. Sejak dibangun September 2015 sampai sekarang sedimen yang terperangkap sudah mencapai ketinggian 45 cm - 70 cm , dan di belakang struktur mulai tumbuh mangrove jenis api-api ( *avicennia* ) secara alami.<sup>10</sup>

Sayangnya upaya masyarakat membangun pengaman pesisir tersebut mendapat ‘ancaman’ berat.Salah satunya dari para pemilik modal yang mengincar kawasan pesisir untuk kepentingan investasi. Bukan rahasia lagi kawasan pesisir Demak merupakan daerah yang sangat strategis untuk dijadikan kawasan industri sebagai penyangga kawasan industri di Semarang yang sudah kelebihan beban. Selain itu rencana tata ruang dan wilayah pemerintah daerah juga belum mendukung partisipasi publik untuk menyelamatkan kawasan pesisir, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam mengatasi banjir rob di Desa Senik Kecamatan Sayung. Agar fokus penelitian ini dan tidak meluas maka penulis memberikan judul : **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DALAM MENANGANI BANJIR ROB DI DESA SENIK KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK “**

---

<sup>10</sup> *Ibid*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan kunci dan problematika yang hendak dicari jawabannya melalui sebuah penelitian. Oleh karenanya mengacu pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah “ Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menangani banjir rob di Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ? “

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, mengamati dan menganalisis kebijakan apa saja yang telah di buat oleh Pemerintah kabupaten Demak dalam upaya menangani banjir rob di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk itu berikut penjelasannya :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial dan ilmu politik terutama mengenai kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan implementasinya. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan model realisasi dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## E. KERANGKA TEORI

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis kebijakan publik dan politik lingkungan.

### 1. Teori Analisis Kebijakan Publik

#### a. Konsep Kebijakan

Tujuan pokok melakukan analisis kebijakan publik adalah untuk meramu secara sistematis beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin, misalnya sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial dan antropologi, kemudian digunakan untuk menginterpretasikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan pemerintah.<sup>11</sup>

Cara lain untuk memahami makna kebijakan adalah dengan melihatnya dari sudut hasil akhirnya, yaitu dalam artian apa yang senyatanya telah di capai. Meski penting, dalam praktik upaya untuk

---

<sup>11</sup>Prof. Drs. H. Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 39

menarik garis pembeda antara keluaran-keluaran kebijakan (kegiatan-kegiatan pemerintah pada saat implementasi) dan hasil akhir kebijakan (dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut) tidaklah begitu mudah. Patut dicatat, bahwa cara memahami kebijakan dari sudut hasil akhir itu akan memungkinkan kita untuk memberikan penilaian mengenai apakah tujuan formal/normatif dari suatu kebijakan (sebagaimana tercantum dalam dokumen) benar-benar telah terbukti terwujud dalam praktik kebijakan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

#### b. Konsep Kebijakan Publik

Edward dan Sharkansky menjelaskan kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup : tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan. Sedangkan Thomas R. Dye menyebutkan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Dari berbagai konsep yang telah disebutkan diatas, studi tentang kebijakan publik, sekalipun tidak secara mendetail, mencakup pula analisis kebijakan.<sup>13</sup>

Karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, maka formulasi kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai proses politik yang dalam praktiknya melibatkan faktor-faktor yang dinamis.

---

<sup>12</sup>Prof. Drs. H. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D, *Pengantar Analisis Kebijakan*( Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammdiyah Malang, 2008), hal. 30-31

<sup>13</sup>Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 4-5

Dinamika yang demikian sering kali menempatkan para aktor pembuatan kebijakan publik pada situasi yang dilematis. Karena mereka dihadapkan pada posisi sulit untuk menentukan pilihan mana yang terbaik dan tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Sering kali suatu pilihan dirasa memberikan keadilan pada satu kelompok masyarakat, namun pada saat yang sama dirasa tidak adil bagi kelompok lain.<sup>14</sup>

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “suatu wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam konteks suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik.”<sup>15</sup>

### c. Konsep Analisis Kebijakan

Suatu deskripsi mengenai analisis kebijakan yang disajikan oleh E.S. Quade, mantan kepala Departemen Matematika di perusahaan Rand, menyajikan dasar kebijakan untuk mendefinisikan analisis kebijakan adalah sebagai berikut :

Suatu bentuk analisis yang menghasilkan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat

---

<sup>14</sup>Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi 2* (Yogyakarta : GAVA MEDIA, 2017 ), hal. Kata Pengantar

<sup>15</sup>*Op Cit*, hal. 51

kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milalkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru.<sup>16</sup>

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dan proses berfikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.<sup>17</sup>

Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan : (1) **nilai** yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) **fakta** yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian

---

<sup>16</sup> William N. Dunn, *pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Jogja : Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 95-96

<sup>17</sup> *Ibid*

nilai-nilai, dan (3) **tindakan** yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.<sup>18</sup>

a. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

William N. Dunn menyebutkan ada tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu :

1.) Analisis Kebijakan Prospektif

Hubungan antara komponen-komponen informasi-kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan: analisis prospektif, retrospektif, dan terintegrasi.

2.) Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis retrospektif, yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis :

- a) Analisis yang berorientasi pada disiplin
- b) Analisis yang berorientasi pada masalah
- c) Analisis yang berorientasi pada aplikasi

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 97

### 3). Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk secara terus-menerus menghasilkan dan menstransformasikan informasi setiap saat. Hal ini berarti bahwa analis dapat terlibat dalam transformasi komponen-komponen informasi-kebijakan searah dengan putaran jarum jam berulang kali sebelum akhirnya pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan.<sup>19</sup>

Analisis yang terintegrasi dapat digambarkan dengan mempertentangkan antara evaluasi-evaluasi retrospektif terhadap kebijakan publik, dan eksperimen-eksperimen program kebijakan. Analisis kebijakan yang terintegrasi mempunyai semua kelebihan yang dimiliki oleh semua metodologi analisis prospektif dan retrospektif, tetapi tidak satupun dari kelemahan mereka. Analisis yang terintegrasi melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu. Oleh karena itu, analisis yang terintegrasi adalah multidisiplin di dalam arti yang sebenarnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 117-124

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 123-124

Dan dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan bentuk analisis kebijakan yang terintegrasi karena penulis berharap dapat mengetahui informasi mengenai keadaan desa di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak khususnya Desa Senik dari sebelum kebijakan mengenai banjir rob di implementasikan dan sesudah di implementasikan.

#### b. Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan

Syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode-metode konvensional, sementara masalah yang rumit menuntut analisis untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan hakekat dari masalah itu sendiri.<sup>21</sup>

Dalam mendefinisikan secara aktif hakekat suatu masalah, para analisis harus tidak hanya menghadapkan diri mereka pada keadaan problematis tetapi juga harus membuat penilaian dan pendapat secara kreatif. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan dibagi ke dalam dua jenis analisis secara seimbang, yaitu perumusan masalah dan pemecahan masalah. Dengan kata lain, pemecahan masalah hanyalah salah satu bagian dari kerja analisis kebijakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Jogja : Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 224-225

<sup>22</sup>*Ibid*, hal.225

### c. Evaluasi Dalam Analisis Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.<sup>23</sup>

Fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan yaitu: pertama, memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan

---

<sup>23</sup>Ibid, hal. 608

secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.<sup>24</sup>

## 2. Politik Lingkungan

### a. Definisi Politik Lingkungan

Abe Ken-ichi mendefinisikan politik lingkungan sebagai suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk secara kritis menganalisis masalah ketetapan sumber daya alam dan asal usul kerusakan sumber daya secara politik ekonomi, dengan maksud itu diperoleh studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis.

Sedangkan Vayda mengomentari, politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan 'progressive contextualization' (kontektualisasi yang maju).<sup>25</sup>

Mengamati skala sosial dan lingkungan yang berbeda, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda. Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara dan kapitalisme global. Kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi aspek-aspek

---

<sup>24</sup>Ibid, hal. 609-610

<sup>25</sup> Herman Hidayat, *Politik Lingkungan pengelolaan hutan masa orde baru dan reformasi*, ( Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 2011 ), hal. 9

yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber lingkungan. Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi dan politik.<sup>26</sup>

Politik lingkungan dalam banyak negara di dunia mempunyai peran penting tidak hanya pada tingkatan yang berbeda, tetapi juga dalam bingkai kerja struktural yang berbeda. Banyak lembaga antar pemerintahan mempunyai peran penting dalam aktivitas yang serupa, membuat aturan lingkungan, membuat kebijakan, penelitian, monitor, training, proyek pembiayaan dan supervisi.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini adalah analisa kebijakan pemerintah dalam menangani bencana banjir air pasang/rob. Banjir air pasang merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut secara global. Adanya pasang naik dan pasang surut akan mempengaruhi kondisi genangan yang terjadi. Fenomena ini menghadirkan kejadian banjir yang disebabkan oleh muka air laut yang disebut rob.<sup>28</sup>

Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang sering terkena banjir rob yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Jumlah desa di pesisir Kabupaten Demak yang terkena banjir rob

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 10

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.12

<sup>28</sup>Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.3 No.2, Juli 2018

adalah 17 desa yang tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Karangtengah. Kecamatan Sayung merupakan kecamatan yang paling parah terkena imbas dari bencana rob. Sejumlah 10 desa dari 17 desa yang terdampak rob di Kabupaten Demak merupakan bagian administratif dari Kecamatan Sayung.<sup>29</sup>

Areal tersebut hampir 80% merupakan kawasan permukiman padat, sehingga kerugian yang diderita warga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut diantaranya penyakit kulit (gatal-gatal), kehilangan 5-100% komponen rumah, genangan yang mempengaruhi kesehatan kesehatan lingkungan serta rusaknya berbagai sarana dan prasarana. Beberapa penyebab yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memperparah terjadinya rob antara lain : penurunan tanah akibat beban diatas muka tanah, bertambahnya tinggi permukaan air laut, tingginya sedimentasi dan sampah, sistem drainase yang tidak tepat, curah hujan dan fenomena alam lain.<sup>30</sup>

Bahkan ada beberapa desa yang telah tenggelam, sehingga membuat beberapa warganya memutuskan untuk berpindah. Rob adalah kejadian meluapnya atau pasanginya permukaan air laut ke daratan di sekitarnya. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya rob adalah (1) karena adanya gaya gravitasi dan efek sentrifugal (adalah

---

<sup>29</sup>Ejurnal.bppt.go.id diakses pada tanggal 15 Mei 2018

<sup>30</sup> Op. cit

dorongan ke arah luar pusat rotasi bumi), (2) bertambahnya kapasitas air di lautan yang di akibatkan oleh mencairnya es (terutama di daerah) kutub yang di sebabkan oleh global warming, (3) terjadinya penurunan permukaan tanah, (4) karena tekanan udara yang rendah di daerah pantai yang dapat menyebabkan permukaan air laut menyembur, (5) karena adanya fenomena-fenomena air laut yang saling berinteraksi.<sup>31</sup>

Proses terjadinya rob yaitu permukaan air laut mengalami kenaikan sehingga melebihi ketinggian permukaan daratan, karena permukaan air laut menjadi lebih tinggi dari permukaan daratan sehingga air laut memasuki daratan dan terjadilah rob atau banjir di daratan oleh air laut. Rob tentunya menyebabkan kejadian-kejadian yang merugikan diantaranya banjir, tercampurnya air tanah di daerah pantai oleh air laut, sehingga air tanah menjadi tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan menjadi lebih mudah berkaratnya alat-alat yang terbuat dari logam yang terkena oleh air laut tersebut.<sup>32</sup> Desa Senik tidak hanya mengalami rob namun sekaligus mengalami abrasi yang mengakibatkan tenggelamnya tambak cukup luas.

Banjir yang terjadi di suatu kawasan memberikan dampak bagi kehidupan di kawasan tersebut. Dampak banjir bagi kehidupan warga seperti ancaman wabah penyakit setelah banjir. Pada saat dan sesudah

---

<sup>31</sup>Dikutip dari situs resmi : <http://www.demakkab.go.id>, pada 15 April 2017

<sup>32</sup>*Ibid*

banjir, ada beberapa tempat yang menyebabkan tersebarnya penyakit menular, seperti tempat pembuangan limbah dan tempat sampah yang terbuka, sistem pengairan yang tercemar, dan sistem kebersihan yang tidak baik. Bakteri menyebar melalui air yang digunakan masyarakat, baik air PAM maupun air sumur yang telah tercemar oleh air banjir. Air banjir membawa banyak bakteri, virus, dan bibit penyakit lainnya, termasuk juga unsur-unsur kimia yang berbahaya.<sup>33</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah tata cara atau prosedur untuk menguji kebenaran suatu obyek atau peristiwa secara terencana, sistematis dan ilmiah. Dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dengan menggunakan lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian sebagai objek penelitiannya. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.

---

<sup>33</sup>Istiarti, *Siaga Menghadapi Bencana Banjir*, (Klaten : CV.SAHABAT, 2008), hal. 16-17

Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>35</sup> Sumber data kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa serta berbagai benda lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

### a. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi yang telah diperoleh didapatkan dari para informan yang dipandang memahami permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

( 1 ) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, ( 2 ) Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan Dinas Kelautan Kabupaten Demak ( 3 ) Staff Pemerintahan Kelurahan Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, ( 4 ) Tokoh Masyarakat Desa

---

<sup>34</sup>Dr. Basrowi, M.Pd. & Dr. Suwandi, M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta:Rineka Cipta, 2008 ) hal. 20-21

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 169

Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, (5) Masyarakat Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Dokumen

Dokumen merupakan objek untuk menyajikan informasi. Tujuan penggunaan dokumen adalah untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan akan permasalahan penelitian dengan melihat dan meneliti dokumen tersebut. Dalam proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari data-data yang berupa arsip, laporan, serta dokumen-dokumen Desa Bedono dan Desa Senik dan dokumen yang ada pada Pemerintah Kabupaten Demak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yaitu cara atau alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang objektif serta valid sebagai bahan guna membuktikan kebenaran dan juga pengetahuan. Data sangat penting dalam penelitian guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Dalam penelitian kualitatif yang instrumen utamanya adalah manusia, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer ) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai ( interviewee ) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>36</sup>

Pada garis besarnya, wawancara mengacu pada pertukaran informasi secara personal antara pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara yang bagus berupaya menjadikan pertukaran itu nyaman dan bersifat percakapan. Sebagaimana dalam percakapan sehari-hari, partisipan seharusnya mengalami wawancara sebagai pengalaman sosial yang menyenangkan.<sup>37</sup>

Sebelum melakukan kegiatan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan perlu dibuat terlebih dahulu kerangka pertanyaan yang sistematis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini penting, agar pertanyaan yang telah diajukan tidak melebar dan tetap fokus sesuai dengan tujuan penelitian.

#### b. Observasi

Observasi yaitu mengamati ragam aktivitas sosial, dengan cara membuka mata dan telinga lebar-lebar pada beberapa kasus, tempat, dan waktu yang berbeda-beda, dan memberi kesempatan seluas-luasnya

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 127

<sup>37</sup>Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, ( Bandung: Nusa Media, 2013 ), hal. 222

kepada subjek penelitian untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-pengalamannya.<sup>38</sup> Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang ada dilapangan, fenomena yang terjadi baik secara formal maupun informal, dan dicatat secara sistematis sebagai hasil pengamatan atas situasi dan kondisi yang terdapat pada lokasi penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha ( proses ) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok : ( 1 ) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan ( 2 ) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.

Tripp mengurai mengenai analisis data secara lebih jelas: analisis data merupakan proses mengurai ( memecah ) sesuatu kedalam bagian-bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data : ( 1 ) identifikasi apa yang ada dalam data, ( 2 ) melihat pola-pola, dan ( 3 ) membuat interpretasi.<sup>39</sup>

Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif, yakni menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami serta disimpulkan.

Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang analisis kebijakan Pemerintah

---

<sup>38</sup>Dr. Basrowi, M.Pd. & Dr. Suwandi, M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta:Rineka Cipta, 2008 ) hal. 189

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 192

Kabupaten Demak dalam menangani banjir rob di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak khususnya Desa Senik.

Menurut Janice Mc. Drury tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang terdapat dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci tersebut dengan tujuan menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan “ model “ yang ditemukan.
- d. Melakukan koding terhadap data-data.<sup>40</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika laporan penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika laporan penelitian.

Bab II Gambaran umum Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, berisi : gambaran geografis, gambaran penduduk, gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta gambaran pendidikan.

Bab III Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Menangani Banjir Rob di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Pada bab ini

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 193-194

terdiri dari empat sub bab utama. Pertama, proses dalam pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Kedua, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam menangani banjir rob di Kecamatan Sayung khususnya Desa Senik. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang telah terimplementasikan dan yang tidak terimplementasikan. Keempat, kebijakan-kebijakan yang mampu menanggulangi atau mengurangi dampak banjir rob di Desa Senik Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

